

LAPORAN TESIS
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI KESEHATAN DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN CALON PENGANTIN



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

**KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI KESEHATAN DALAM
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN CALON PENGANTIN**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Kesehatan



Tri Wahyudi
NIM 22.C20071

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Calon pengantin yang tidak memenuhi syarat minimal usia tersebut hanya dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapatkan izin dari pengadilan melalui permohonan dispensasi kawin. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah surat Rekomendasi Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan Rekomendasi Kesehatan terhadap calon pengantin dalam permohonan Dispensasi Kawin? dan bagaimana kedudukan hukum Rekomendasi Kesehatan dalam permohonan Dispensasi Kawin calon pengantin di Kota Pontianak? Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam memberikan Rekomendasi Kesehatan terhadap calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin. Kedudukan hukum Rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan dalam sidang permohonan dispensasi kawin calon pengantin adalah lemah. Rekomendasi kesehatan hanya merupakan kelengkapan administratif dalam menentukan keputusan.

Kata kunci : dispensasi kawin, rekomendasi kesehatan, kedudukan hukum

ABSTRACT

The Marriage Law stipulates that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. Prospective brides and grooms who do not meet the minimum age requirement can only marry after obtaining permission from the court through a marriage dispensation application. One of the requirements that must be met in submitting a marriage dispensation application is a health recommendation letter. The research problem formulation in this study is how the Pontianak City Health Office regulates providing health recommendations to prospective brides and grooms in marriage dispensation applications? And what is the legal status of health recommendations in marriage dispensation applications for prospective brides and grooms in Pontianak City? The research employs both normative juridical and socio juridical approaches. The findings indicate that there are currently no regulations governing the Pontianak City Health Office regarding the issuance of health recommendations for prospective brides and grooms applying for marriage dispensations. The legal standing of health recommendations issued by Community Health Centers (Puskesmas) or the Health Office during marriage dispensation hearings is weak; such recommendations serve merely as administrative requirements for the decision making proces.

Keywords : marriage dispensation, health recommendations, legal status

